

KAPITAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

M. Miftahusyain

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

Social capital related with collective value in the social network which is growth-develop as the implication of reciprocal relationship that occur therein. Collective value is naturally creating and maintaining social capital. Increases, decreases, or the survival social capital is depends on the collective values that exist in social network. In short, social capital is recognized has great influence from economic development and poverty reduction. In Indonesia to dig and take the hidden social capital need to be knitted trust of each element of this nation. Trust is media and first step to bind “Bridging Social Capital” of Indonesia. Ethic, religion, race, language, party, ideology, and other various primordial barriers should be fostered to strengthen social capital. Indonesia has been proven -through the struggle against the colonizer- that social capital in Indonesia is so “extraordinary”.

Keywords: *Social Capital, Development.*

A. Pendahuluan

Dalam “*The Forms of Capital*”, Pierre Bourdieu (1986) membagi kapital dalam tiga bentuk, yaitu : kapital ekonomi (*economic capital*), kapital budaya (*cultural capital*) dan kapital sosial (*social capital*). Kapital ekonomi lebih mengarah pada penguasaan sumber daya ekonomi, seperti : uang dan hak milik (asset). Kapital budaya mengacu pada bentuk-bentuk ilmu-pengetahuan, skills, pendidikan yang banyak memberikan keuntungan bagi manusia untuk mendapatkan martabat yang lebih tinggi – termasuk cita-cita yang agung – dalam masyarakat. Menurut Bourdieu, para orang tua mengenalkan pada anak-anak kapital budaya berupa perilaku dan ilmu-pengetahuan (cara pandang) melalui sistem pendidikan yang nyaman, sehingga memudahkan transformasi dan kesinambungan budaya antar generasi. Dan, kapital sosial mengacu pada sumberdaya yang terkandung, mempengaruhi dan mendukung sebuah kelompok sosial (dan juga masyarakat – pen) berupa keanggotaan, relasi/hubungan dan jejaring/jaringan. Dari ketiga kapital tersebut, untuk konteks strategi pembangunan di Indonesia cenderung menganak-emaskan kapital ekonomi.

Selama ini, kapital ekonomi sering diartikan dengan pengakumulasian sumberdaya uang sehingga mempengaruhi aktivitas yang lebih pragmatis. Dalam konteks ini, seolah-olah uang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok. Uang, menjadi kekuatan tersembunyi (invisible hand) untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan manusia, baik individual maupun kelompok. Tetapi, menurut Lawang (dalam Adnan, 2006 :

96) kapital ekonomi bukanlah akumulasi dari keuangan, kapital ekonomi tidak sama dengan uang. Ia (baca: uang) hanya berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan kapital ekonomi adalah sebuah kapasitas untuk menata kesempatan atau peluang untuk memperoleh uang (memenuhi kebutuhan). Dalam proses pemenuhan kebutuhan itulah interaksi sosial terjadi dan pertarungan ego selalu tumbuh subur.

Kapital ekonomi mendorong individu/kelompok untuk saling berebut mendapatkan uang atau memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadikan hubungan sosial yang dibangun berwatak materialism-individual. Relasi-relasi sosial yang bersifat altruistik, demi kepentingan bersama menjadi terabaikan. Strategi pembangunan yang mengedepankan kapital ekonomi – secara signifikan – berimplikasi terjadinya kompetisi (atau bahkan konflik) di masyarakat. Banyak kasus-kasus di lapangan (YIIS, 2001:26) yang menunjukkan bahwa kerusuhan sosial seringkali disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial, akibat kesenjangan yang cukup tajam antara yang kaya dengan yang miskin.

Lebih dari itu, orientasi pembangunan berbasis kapital ekonomi juga memunculkan masalah-masalah sosial yang kompleks, seperti : kriminalitas, prostitusi, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengangguran, perilaku bias gender, kemiskinan, munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, polusi udara dan seterusnya. Dalam bahasa lain, pembangunan yang hanya berbasis kapital ekonomi ini, pada kenyataannya, melahirkan ironi pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, substansi pembangunan mengalami distorsi fungsional, seperti makin tajamnya frekuensi kekerasan dan ketimpangan sosial. Bukti konkretnya adalah terjadinya kerusuhan sosial dan tingginya kriminalitas di banyak tempat.

Oleh karena itu, para teoritikus sosial berpandangan bahwa “*Development Studies*” merupakan sebuah bidang kajian yang multi-dimensi. Pembangunan tidak bisa dikaji hanya dengan menggunakan prespektif ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek yang lain, aspek sosial dan budaya misalnya.

Paper ini bermaksud mengurai “benang kusut” pembangunan di Indonesia dengan menggunakan sudut pandang social capital. Social capital merupakan konsep baru dalam ilmu sosiologi yang baru berkembang menjelang akhir abad 20. Di Indonesia, kajian yang mendalam tentang social capital ini masih jarang dilakukan – bahkan hampir tidak ada. Padahal, untuk konteks pembangunan di Indonesia, kajian tentang *social capital* ini sangat relevan dilakukan. Kami berharap, tulisan ini bisa menggugah kesadaran kognitif kita tentang pentingnya mengkaji pembangunan dalam prepektif sosial (dan budaya tentunya).

B. Apa Itu Kapital Sosial ?

Konsep kapital sosial didasarkan atas sebuah premis mayor bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri alamiah untuk mengikat hubungan pertemanan atau persaudaraan. Pierre Bourdieu (1986), mendefinisikan kapital sosial sebagai berikut :

“Social Capital as the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition.”(Bourdieu, 1986).

(Kapital sosial sebagai akumulasi sumberdaya aktual atau potensial yang berkaitan dengan penguasaan jaringan yang mampu bertahan lama atau setidaknya tidaknya pelembagaan hubungan perkenalan dan pemberian penghargaan yang saling menguntungkan).

Bourdieu berpandangan bahwa setiap jaringan sosial mempunyai kemampuan untuk mereproduksi kekuatan (power) dan keragaman (Dwyer et.all, 2006). Keragaman (*inequality*) yang tereproduksi dalam sebuah jaringan sosial mempunyai nilai tambah yang menguntungkan dalam hal pembagian “deskripsi kerja” (job description) masing-masing individu/kelompok yang terdapat dalam jaringan sosial tersebut.

Dalam bahasa lain, kapital sosial berhubungan dengan nilai kolektif dalam sebuah jaringan sosial yang tumbuh-kembang sebagai implikasi dari hubungan-hubungan timbal balik yang terjadi didalamnya. Nilai kolektif inilah yang secara “alamiah” menciptakan dan mempertahankan kapital sosial. Bertambah, berkurang ataupun bertahannya kapital sosial tergantung dari nilai kolektif yang ada dalam sebuah jaringan sosial. Lebih jauh, Putnam, penggagas awal kapital sosial (meski bukan yang original) mendefinisikan kapital sosial sebagai :

“Social Capital is features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit” (Putnam 1995).

(kapital sosial adalah bagian dari organisasi sosial berupa jaringan-jaringan (sosial – pen), norma-norma (sosial – pen) dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama.)

Pemaknaan tentang kapital sosial dari Boudieu dan Putnam di atas mengisyaratkan bahwa – berbeda dengan kapital ekonomi yang cenderung individualistik – kapital sosial menghendaki adanya masyarakat yang dibangun secara komunal. Kapital sosial lebih mengarahkan membangun masyarakat (dan juga negara) dengan menggali potensi sumberdaya sosial berupa koneksitas yang saling menguntungkan dalam sebuah jaringan sosial.

Secara bangunan teoritis, Lin (1999) memasukkan teori tentang kapital sosial ini dalam bingkai *“The Neo Capital Theories”* (lihat Tabel 1). Lin sendiri – berbeda dengan

Bourdieu dan Putnam – melihat kapital sosial lebih cenderung dalam prespektif individual, yakni seberapa jauh kemampuan individu/ kelompok dalam mengakses untuk/dan menggunakan sumberdaya sosial yang tersimpan (*embedded*) pada sebuah jaringan-jaringan sosial. Kapasitas individu/kelompok tersebut dalam mengakses sumberdaya sosial akan memperkuat sekaligus mempertahankan eksistensi dirinya.

Table 1. Teori-Teori Kapital

	The Classical Capital Theory	The Neo-Capital Theories			
		Human Capital	Cultural Capital	Social Capital	
Theorist	Marx	Schultz, Becker	Bourdieu	Lin, Burt, Marsden, Flap, Coleman	Bourdieu, Coleman, Putnam
Explanation	Social relations: Exploitation by the capitalists (bougeoise) of the proletariat.	Accumulation of surplus value by laborer	Reproduction of dominant symbols and meanings (values).	Access to and use embedded in social networks	Solidarity and reproduction of group
Capital	A. Part of surplus value between the use value (in cosumption market) and the exchange value (in production-labor market of the commodity) B. Investment in the production and circulation of commodities.	Investment in technical skills and knowledge	Internation alization or misrecognit ion of dominant values	Investment in social networks	Investment in mutual recognitian and acknowledg ment
Level of analysis	Structural (classes)	Individual	Individual/ class	individual	Individual or group

Sumber : Lin, 1999: 30

Bagi Lin, setiap komunitas atau kelompok sosial pasti mempunyai simpanan sumber daya (*embedded resouces*) sosial. Individu yang mampu menggali, mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya sosial inilah yang bisa menikmati kapital sosial. Oleh karena itu, Lin menganjurkan, untuk memperbanyak/memperkaya kapital sosial, individu harus melakukan banyak investasi pada jaringan-jaringan sosial. Investasi sosial ini bisa berupa: aktif dalam organisasi-organisasi sosial; memberi penghargaan, bantuan atau empati pada

kolega; memperluas jaringan sosial dengan membuka perkenalan dan pertemanan baru atau suasana (tempat) baru.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kapital sosial di antara para teoritikus, terdapat satu persamaan persepsi di antara mereka bahwa jaringan sosial (*social network*) merupakan elemen terpenting dari kapital sosial. Untuk kepentingan analisis sosial, Putnam (2000) membagi kapital sosial (baca:koneksitas) sebuah jaringan sosial dalam dua bentuk, yaitu :

1. *Bonding*, berhubungan dengan bentuk koneksitas yang bersifat intim, melekat dan kuat. Koneksitas seperti ini dapat terwujud dalam jaringan sosial yang bersifat homogen. Contoh yang digunakan Putnam adalah gang-gang kriminal (seperti : Yakuza dan Mafia).
2. *Bridging*, berhubungan dengan bentuk koneksitas yang lebih bersifat longgar, terbuka dan plural. Koneksitas seperti ini dapat terwujud dalam jaringan sosial yang bersifat heterogen. Contoh yang diambil Putnam adalah kelompok paduan suara dan klub bowling (sesuai dengan judul bukunya).

Menurut Putnam, *Bridging Social Capital* harus terus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. *Bridging Social Capital*, masih menurut Putnam, mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, pemerintah, individu dan komunitas. Untuk memperkuat kapital sosial, masyarakat harus didorong menumbuhkan (to create) organisasi-organisasi sosial berkarakter *bridging* ini dan aktif didalamnya. Putnam berujar:

“joining an organization cuts in half an individual’s chance of dying within the next year.” (Putnam, 2000)

(Bergabung dalam sebuah organisasi (*sosial/bridging – pen*) memotong ½ dari kemungkinan kematian individu dalam setahun ke depan).

Singkatnya, kapital sosial diakui mempunyai pengaruh yang besar mulai dari peningkatan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan (Rudy, 2006; Hayami, 1997; dan Quillian, 2006;) , sampai dengan terciptanya masyarakat sipil (*civil society*) [Putnam, 1993; Burt, 2000; De Fillipis, 2001; Dwyer, et.ell, 2006; dan Fukuyama, 1999].

Trust : Menemukan Kembali Kapital Sosial Indonesia yang Terpendam

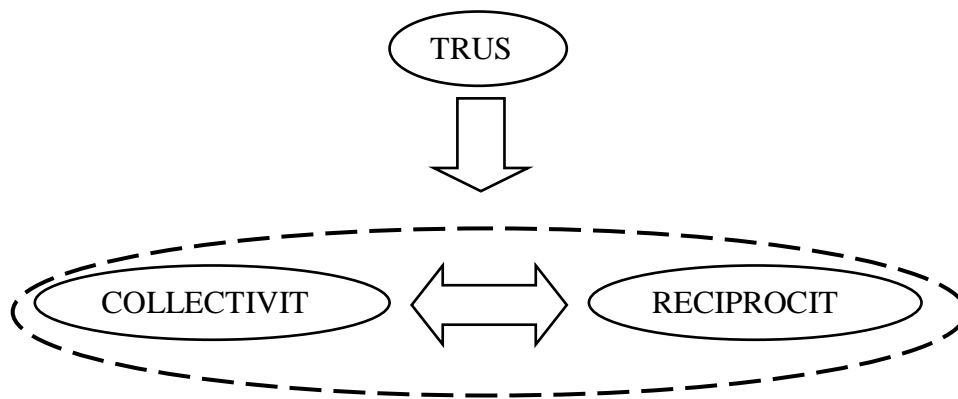
Thomas Hobbes membuat sebuah asumsi bahwa hakekatnya manusia adalah individu yang cenderung senang berkelahi, senang berperang dan berkonflik untuk memperebutkan status dan peran yang lebih besar di masyarakat. Kerjasama terjadi hanya sekedar alat negoisasi untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Asumsi ini agaknya merupakan

ide awal dari pemikiran Filsafat Eksistensialisme di Eropa (Perancis), yang terutama dikembangkan oleh Jean Paul Sartre. Menurut Sartre (Murata, 1996) :

“Manusia tidak mempunyai sifat alami, fitrah atau esensi (*innate nature*). Eksistensi manusia tergantung pada bagaimana ia menciptakan esensinya sendiri. Karenanya apa yang dimaksud dengan esensi manusia pada dasarnya adalah *socially created*, yaitu tergantung dari lingkungan di mana ia berada.”

Bagi penganut paham eksistensialisme, untuk menciptakan esensi bagi keberadaan (baca : eksistensi) dirinya dalam sebuah masyarakat, maka dia harus menggagas “*socially created*” yang menunjang untuk itu.

Asumsi bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk berkelahi atau berperang seperti yang dikemukakan oleh Thomas hobbes di atas, ditolak oleh para teoritikus kapital sosial, Francis Fukuyama misalnya. Bagi Fukuyama, justru sebaliknya, manusia adalah individu yang cenderung suka bekerjasama. Dalam buku *The Great Disruption* (2002), Fukuyama mengajukan beberapa data lapangan yang menunjukkan bahwa hubungan kerjasama adalah sebuah keniscayaan bagi komunitas manusia. Kerjasama adalah sebuah kapital sosial yang harus dipertahankan. Terdapat tiga item paralel (lihat gambar 1) bagi terwujudnya kapital sosial yang tangguh, yaitu *Trust* (kepercayaan), *Reciprocity* (hubungan timbal balik) dan *Collectivity* (aksi bersama).



Sumber : diadaptasi dari Fukuyama, 2002

Gb. 1. Relasi antara Trust, Reciprocity dan Collectivity

Menurut Fukuyama, *trust* (kepercayaan) merupakan pondasi utama sekaligus pengikat bagi terjalannya kerjasama (*cooperation*) dan koordinasi (*coordination*). Adanya kepercayaan (*trust*) memungkinkan terwujudnya hubungan timbal balik dan aksi bersama yang bersifat genuin, didorong atas dasar kebutuhan komunitas, dan mampu menggerakkan seluruh potensi kapital sosial yang terpendam.

Lin, Bart, Marsden, Flap dan Coleman – untuk memperkuat dan mereproduksi kapital sosial – menganjurkan melakukan investasi (sosial) dalam jejaring sosial (*social networks*),

sedangkan Bourdieu dan Putnam lebih cenderung menganjurkan investasi (sosial) dalam bentuk saling memberikan penghargaan dan pengakuan. Kepercayaan (*trust*) merupakan wujud konkret investasi sosial dalam jejaring sosial seperti yang dianjurkan oleh Lin. dkk. Sementara itu, dalam konteks investasi sosial seperti yang dianjurkan oleh Bourdieu dan Putnam, pemberian penghargaan dan pengakuan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan dan memberikan kepercayaan (*trust*).

Oleh karena itu, para teoritikus sosial sepakat bahwa kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang elementer dalam memperkuat dan mereproduksi kapital sosial. Giddens (dalam Juliawan, 2000) mendefinisikan *trust* sebagai :

“Keyakinan (*confidence*) terhadap dapat dipercayainya seseorang atau bekerjanya suatu sistem dalam sebuah kejadian (menyangkut pribadi) atau untuk menghasilkan out-put tertentu (suatu sistem).”

Berpijak dari definisi tersebut, Giddens (Juliawan, 2000) membagi *trust* dalam dua tipe yang satu sama lainnya saling terkait, yaitu :

1. *Trust* terhadap *abstract systems*, yakni kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebagai implikasi dari berfungsinya institusi-institusi publik dengan baik. Misalnya, para nasabah bank menaruh kepercayaan terhadap hitungan saldo yang tertuang dalam mesin ATM atau calon penumpang pesawat terbang yang percaya (*trust*) bahwa pukul 07.00 WIB, pesawat akan tinggal landas. Artinya, dalam konteks ini, piranti-piranti (atau juga institusi-institusi) modern menghasilkan keajegan sistem (dan ini bersifat rutin) sehingga individu/kelompok merasa yakin (*confident*) akan terulangnya keajegan sistem tersebut diwaktu-waktu mendatang.
2. *Trust* terhadap *personal*, kepercayaan (*trust*) yang terbangun sebagai implikasi adanya interaksi intim dan terus-menerus antara individu yang satu dengan individu yang lain. Misalnya, seorang anak yang menjalin interaksi intim dan terus-menerus dengan ibunya akan menghasilkan hubungan yang saling mempercayai.

Kedua tipe *trust* tersebut saling berhubungan, tak dapat dipisahkan. Keberadaannya (*trust*) secara simultan dan otomatis akan menggali sekaligus mengumpulkan puing-puing kapital sosial yang berserak dan terpendam.

Untuk konteks Indonesia post-reformasi, keberadaan *trust* merupakan sesuatu yang harus menjadi sorotan. Indikasi terjadinya krisis kepercayaan di segala bidang merupakan fenomena umum yang dapat kita simak setiap hari. Korupsi, kolusi, nepotisme, kriminalitas, dan bentuk-bentuk patologi sosial lainnya merupakan indikator bahwa di Indonesia saat ini sedang mengalami “*anomie*” sosial yang berakar dari telah lunturnya kepercayaan (*trust*)

masyarakat terhadap para pemimpin, hukum, sistem, teman sejawat dan yang sangat memprihatinkan, masyarakat Indonesia sekarang ini juga sedang mengalami indikasi ketidakpercayaan pada kebudayaannya sendiri.

Hal ini merupakan sebuah ironi dari bangsa besar yang keberadaannya berawal dari hasil akumulasi perjuangan kolektif seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia hadir sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*) dan diakui dunia bukan karena hadiah dari penjajah Hindia-Belanda dan/atau Jepang, tetapi atas usaha kolektif seluruh anak bangsa. Kekolektifitasan – terpatrit dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika – yang pernah menjadi tumpuan Indonesia tersebut sekarang telah hilang. Kapital sosial Indonesia yang kuat dan tangguh agaknya sekarang telah memudar, hilang-terpendam oleh egoisme individu/kelompok.

Oleh karena itu, untuk menggali dan mengangkat kembali kapital sosial yang terpendam tersebut perlu dirajut kepercayaan (*trust*) dari masing-masing elemen bangsa. *Trust* merupakan media dan langkah awal untuk mengikat ‘*Bridging Social Capital*’ yang dimiliki Indonesia. Suku, agama, ras, bahasa, partai, ideologi, dan beragam sekat-sekat primordial lainnya seharusnya ditumbuh-kembangkan untuk memperkuat kapital sosial. Dan, Indonesia pernah membuktikan – melalui perjuangan melawan penjajah – bahwa kapital sosial yang dimiliki Indonesia sangat “luar biasa” dahsyatnya.

C. Urgensi Kapital Sosial dalam Pembangunan Berbasis Komunitas

Strategi pembangunan seharusnya dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup bukan hanya aspek pembangunan ekonomi, tapi juga mencakup diantaranya aspek perubahan dalam struktur sosial, politik, prilaku maupun struktur kelembagaan kemasyarakatan. Menurut beberapa pengamat, krisis yang melibas berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia selama ini salah satu sebab utamanya karena kekeliruan pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan, yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhannya yang tinggi. Dalam bahasa populer dikenal dengan istilah ekonomi sebagai panglima pembangunan.

Menurut Mas’oed (2003), disamping ekonomi sebagai panglima (ESP) masih terdapat dua lagi pendekatan pembangunan, yaitu : politik sebagai panglima (PSP) dan moral sebagai panglima (MSP). Tabel 2 memberikan secara ringkas beberapa perbedaan masing-masing pendekatan pembangunan tersebut.

Bagi Mas’oed, pendekatan PSP memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara, yang diwakili oleh para birokratnya, sebagai

aktor pertama pembangunan. Negara, yang didukung oleh mekanisme kekuasaan politik dan dituntun oleh ideologi “statist” – cenderung otoriter – dipandang sebagai satu-satunya pelaku yang mampu melakukan intervensi ke dalam proses pembangunan ekonomi demi mengatasi berbagai “*bottlenecks*” yang dihadapi oleh proses itu. Karena itu, pembangunan yang berhasil hanya mungkin kalau dijamin oleh negara yang kuat. Dengan kata lain, esensi dari proses pembangunan adalah pembinaan kekuatan negara.

Tabel 2. Tiga Pendekatan Pembangunan

	Politik Sebagai Panglima (PSP)	Ekonomi Sebagai Panglima (ESP)	Moral Sebagai Panglima (MSP)
AKTOR	Negara (birokrasi)	Pasar (pengusaha)	Komunitas lokal (rakyat)
MEKANISME	Kekuasaan politik	Kekuasaan ekonomi	Kekuasaan rakyat
IDEOLOGI	Statisme/konservatif	Liberal	Populis

Sumber : Mas’oed (2003)

Sementara itu, pendekatan ESP lebih mengutamakan peranan pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan. Para aktor ini dibayangkan melakukan alokasi sumberdaya dan pembuatan keputusan ekonomi lain berdasarkan pertimbangan pasar, yaitu mengikuti dinamika kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, mereka juga dianggap berkecenderungan liberal, dalam arti lebih suka bekerja tanpa banyak intervensi pemerintah. Ini terutama nampak jelas pada sikap mereka yang setiap kali ada kelesuan ekonomi menuduh kekakuan birokrasi sebagai biang keladinya dan karena itu menuntut deregulasi atau pelanggaran intervensi negara terhadap proses produksi. Kalau toh negara harus melakukan intervensi, tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi yang diperlukan bagi akumulasi dan reproduksi kapital.

Kelompok pemikiran MSP, walaupun sering diperdebatkan di kalangan cendekiawan, bukan pendekatan yang biasa dibahas di kalangan elit penguasa. Ini adalah pandangan yang menegaskan bahwa cara paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Untuk itu, wewenang pembuatan keputusan mengenai pembangunan, yang selama ini dimonopoli pemerintah, harus dikembalikan kepada rakyat atau komunitas lokal. Lapisan masyarakat yang dalam retorika para elit penguasa selalu disebut-sebut sebagai pelaku pembangunan yang sejati. Karena itu, mekanisme pembangunan yang diandalkan adalah kekuatan rakyat

(*people power*). Misalnya demi menanggulangi krisis pembangunan sekarang ini, seperti masih meluasnya kemiskinan, memburuknya kerusakan lingkungan dan meningkatnya tindak kekerasan, pendekatan yang didasarkan pada ideologi populisme ini menganjurkan pengaktifan kembali lembaga-lembaga lokal.

Sementara pendekatan pertama menekankan peranan negara sebagai mode pengorganisasian yang dominan, dan pendekatan kedua menekankan korporasi, pendekatan ketiga ini mengandalkan pengorganisasian politik (dan sosial) berupa gerakan-gerakan sosial yang “*issue oriented*” dan yang memiliki aspirasi global melintasi batas-batas negara-bangsa (*nation-state*). Berbagai gerakan sosial ini berfungsi memobilisasi kekuatan dari bawah dengan tujuan mengendalikan kondisi-kondisi kehidupan yang fundamental, seperti pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan hak-hak asasi lainnya.

Orientasi pembangunan dengan pendekatan Moral Sebagai Panglima (MSP) – dan ini dianggap oleh para ilmuwan sebagai pendekatan yang proporsional untuk menciptakan keseimbangan pembangunan – adalah menjadikan rakyat atau komunitas lokal sebagai aktor utama. Hal ini mengharuskan proses pembangunan memihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dalam konteks strategi pembangunan, pendekatan MSP ini mempunyai hubungan yang paralel dengan konsep ekonomi kerakyatan dan/atau pemberdayaan masyarakat.

Menjadikan rakyat atau komunitas lokal sebagai aktor pembangunan menuntut adanya infrastruktur sosial di tingkat akar-rumput. Infrastruktur pertama (dan utama) yang harus digali dan ditemukan kembali adalah kapital sosial yang lama terpendam (*embedded*) oleh arogansi kapital ekonomi yang selama ± 32 diterapkan rezim Orde Baru. Nantinya, jika kapital sosial ini telah bisa digali dan diangkat ke permukaan, saya yakin energi yang ada dalam kapital sosial tersebut mampu menggerakkan seluruh sumber-daya (ekonomi, sosial dan budaya) yang dimiliki masyarakat. Bukti nyata mengenai hal ini dapat disimak dari paparan Rudy (2006) mengenai perbandingan antara komunitas yang mampu memanfaatkan kapital sosial dengan komunitas yang tidak memanfaatkannya. Mengutip laporan berita sebuah televisi Jepang, Rudy melukiskannya sebagai berikut:

Dalam salah satu program televisi Jepang beberapa saat yang lalu, ditayangkan beberapa usaha partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan di lingkungannya. Philadelphia dan Birmingham dijadikan fokus utama dalam acara tersebut, digambarkan usaha di dua kota menghasilkan keluaran yang berbeda-beda. Philadelphia dengan pemisahan yang begitu nyata antara lingkungan miskin dan kaya gagal melakukan suatu usaha kolektif untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Kegagalan tersebut juga ditandai dengan adanya konflik

antara warga kulit putih yang mayoritas kaya dengan warga kulit hitam yang mayoritas miskin.

Kemudian digambarkan suasana Birmingham pada 10 tahun lalu dimana taman-taman kota dipenuhi para wanita tuna susila, yang mencoretkan gambaran buram bagi masyarakat. Birmingham, Saat ini mencapai keberhasilan yang Menakjubkan, kesenjangan ekonomi berkurang sangat pesat dan bahkan hampir tidak dijumpai lagi wanita tuna susila yang berkeliaran di taman-taman kota. Kemajuan tersebut merupakan pencapaian luar biasa yang dicapai atas usaha masyarakat dimulai dari prakarsa sampai usaha yang dijalankan oleh masyarakat lokal. Mungkin kita bertanya-tanya mengenai kekuatan apakah yang begitu hebatnya sehingga dapat membangkitkan dan menggerakkan serta membimbing mereka menuju keberhasilan dan faktor apakah yang menyebabkan kegagalan daripada usaha masyarakat lokal di Kota Philadelphia. Kekuatan tersebut tidak lain adalah kekuatan masyarakat dalam bentuk kapital sosial.

Deskripsi di atas, menyadarkan kita bahwa kapital sosial mempunyai kekuatan yang “luar biasa” untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat. Dan, hal ini (baca : kapital sosial) merupakan elemen dasar agar alternatif pembangunan berbasis komunitas bisa menuai hasil seperti yang diharapkan.

D. Mengelola Kapital Sosial Untuk Membangun Indonesia

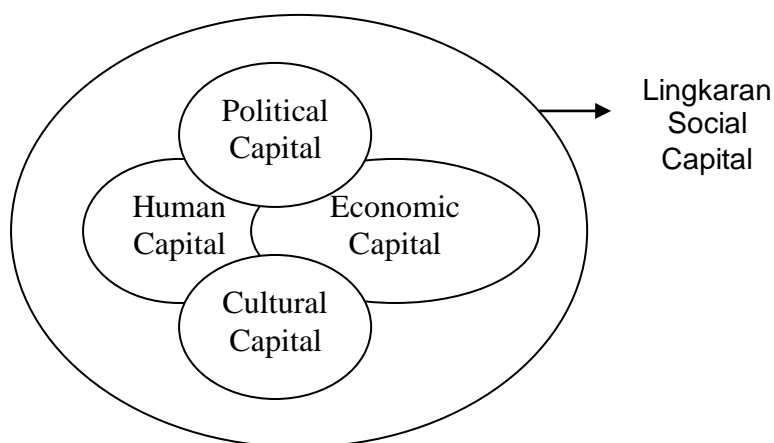
Membuka diskusi kita pada bagian ini, ada baiknya kita simak dan renungkan secara mendalam deskripsi tentang Indonesia yang dipaparkan oleh Nababan (1995) – seorang aktifis lingkungan hidup – berikut ini :

“Dengan luas keseluruhan kurang lebih 5 Juta Km² dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Dengan posisinya yang membentang sekitar 5.000 Km di garis khatulistiwa, Indonesia diperkirakan memiliki tidak kurang dari 47 tipe ekosistem yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, salah satu yang terkaya di dunia. Kekayaan hayati ini telah menghidupi lebih dari 500 kelompok etnis asli penghuni negeri ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka hidup tersebar mulai dari garis pantai, seperti suku Bajau di teluk Tomini, sampai di daerah pegunungan, seperti orang Dani di Lembah Baliem, Pegunungan Jayawijaya.”

Luar biasa ! demikian seharusnya ungkapan yang terlontar dari mulut kita menyimak deskripsi tentang Indonesia tersebut. Kekayaan hayati dan sumber daya alamnya yang melimpah ruah merupakan bahan baku bagi kapital ekonomi Indonesia. Demikian halnya dengan keragaman etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan bahan baku bagi kapital budaya. Dan, jika kedahsyatan Indonesia kita perpanjang, negeri ini menampung lebih dari 200 Juta penduduk – termasuk dalam 4 besar negara berpenduduk terbesar di dunia. Limpahan penduduk yang melimpah-ruah ini merupakan bahan baku kapital manusia. Singkatnya, dilihat dari banyak segi, Indonesia adalah negeri yang kaya-*raya*.

Kapital – manusia, ekonomi, dan budaya – Indonesia yang melimpah ruah tersebut, jika dikelola dengan baik bukan hal yang mustahil menjadikan negeri ini sebagai mercusuar dunia – sebagaimana dicita-citakan oleh para *founding father*. Tapi sayang, kedahsyatan dan kekayaan kapital yang dimiliki Indonesia – sampai saat ini – belum sanggup mengangkat harkat-martabat dan kesejahteraan bangsa secara kolektif. Indonesia masih terjebak dalam multi krisis yang berkepanjangan (*ongoing multiple crisis*).

Permasalahan kronis Indonesia yang menyebabkan negeri ini begitu rapuh adalah hancurnya kapital sosial sebagai perajut-pengikat sekaligus penggerak seluruh kapital (lihat Gb.2). Mustahil, negeri yang kaya-raya ini sanggup bangkit membangun dirinya jika jejaring sosial yang ada didalamnya terurai, terpisah dan bahkan terdekonstruksi.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gb.2. Kapital Sosial Sebagai Pengikat dan Penggerak seluruh kapital

Sejatinya, keberhasilan Indonesia untuk bangkit tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan individual (*human capital*), kekayaan alam yang melimpah-ruah (*economic capital*) dan keragaman budaya (*cultural capital*) yang dimilikinya. Tetapi, tumpuan utama dalam membangun Indonesia terletak pada akumulasi kerja kolektif yang diusahakan oleh setiap elemen anak bangsa. Setiap anak bangsa seharusnya bahu-membahu, bergotong-royong, dan sesakit-sependeritaan membangun Indonesia. Nilai-nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sebagai satu bangsa harus kita rajut kembali. Jejaring sosial yang terurai/terpisah oleh egoisme dan kepentingan individu/kelompok sudah saatnya untuk direkonstruksi. Inilah kapital sosial Indonesia,

Penulis yakin, hubungan sosial yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempercayai merupakan daya dorong yang kuat untuk membangun Indonesia.

Terdapat enam item yang harus dipegang teguh setiap anak bangsa untuk tetap merahayulestarikan kapital sosial Indonesia, yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen awal pendiri bangsa yang menentu-tetapkan NKRI sebagai pilihan untuk menata negara harus tetap dijaga. Setiap usaha separatisme atau yang mengarah pada separatisme harus dicegah. Pemisahan satu wilayah dari NKRI pasti akan menghancurkan kapital sosial yang sudah terbangun.
2. Sang Saka Merah Putih, kita mempunyai bendera nasional “Merah-Putih” yang sakral dan mempunyai nilai heroik. Keberadaannya harus mengatasi segala bentuk bendera kelompok, golongan, organisasi, partai, dan kepentingan. Disaat berbicara kepentingan nasional, seluruh atribut bendera kelompok yang beraneka-ragam harus tunduk bertawajuh pada kesakralan Sang Saka Merah Putih.
3. Bahasa Nasional, Sumpah Pemuda 1928 telah mendeklarasikan untuk menjadikan Bahasa Indonesia – yang berpijak dari Bahasa Melayu – sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan. Eksistensi bahasa Indonesia harus tetap kita jaga – dengan tanpa menghancurkan keunikan bahasa-bahasa tradisional yang dimiliki oleh masing-masing etnis. Bahasa (atau lebih tepatnya komunikasi) adalah minyak pelumas untuk memperlancar interaksi antar “*Bridging Social Capital*” yang dimiliki Indonesia.
4. Lagu Kebangsaan, Sumpah Pemuda 1928 juga telah memperdengarkan pada khalayak umum untuk pertama-kalinya lagu Indonesia Raya buah karya WR. Supratman dan lagu ini juga kembali dinyanyikan mengiringi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Spirit dan energi yang dimiliki lagu Indonesia Raya sungguh dalam dan dahsyat menggetarkan setiap relung jiwa anak bangsa. Lagu Indonesia Raya harus dijadikan pengikat rasa persaudaraan bagi seluruh elemen bangsa.
5. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa, kita sepenuhnya sadar bahwa Indonesia adalah negara multi-kultur. Keragaman ini – untuk memperkuat *Bridging Social Capital* – harus diikat oleh satu ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus kita gali dan diaplikasikan dalam tata hubungan sosial. Setiap sila dari Pancasila merupakan karakter inti (*core characterisc*) dari nilai-nilai kultur-budaya setiap etnis yang ada di Indonesia.
6. TNI-Polri dan Institusi Hukum yang Tangguh dan Berwibawa, Indonesia mempunyai TNI-Polri yang berfungsi tunggal sebagai penjaga pertahanan dan

keamanan bangsa. Kedudukannya harus kuat dan berwibawa. Kuat dalam arti dilengkapi dengan piranti persenjataan yang memadai dan layak-guna. Berwibawa bermakna mempunyai kemampuan untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri/kelompok, bahkan demi kepentingan TNI-Polri itu sendiri. Berwibawa juga berarti bebas dari campur-tangan pihak asing, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang bisa mempengaruhi kemandirian dan obyektivitas TNI-Polri. Demikian halnya dengan institusi hukum (Kejaksaan, Kehakiman dan Mahkamah Agung) harus mampu menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. *Trust* akan tumbuh jika hukum dan undang-undang berjalan dengan semestinya.

Keenam item tersebut merupakan *abstract systems* yang berfungsi menjamin kepercayaan (*trust*) pada setiap elemen bangsa Indonesia yang multi-kultur. *Abstract systems* ini harus mampu diterjemahkan dan dikomunikasikan dengan baik oleh para *experts* dan *lay agents* kepada seluruh masyarakat (dan dunia internasional). Kegagalan menterjemahkan dan mengkomunikasikan *abstract systems* ini pada kehidupan sehari-hari berimplikasi pada hilangnya kepercayaan dan menjadikan kapital sosial Indonesia kembali terurai. Dampaknya, spirit kolektif untuk membangun bangsa menjadi pudar.

Kepercayaan terhadap keenam abstract systems tersebut juga harus ditunjang dengan kepercayaan pada individu (*personal*), yang terujuk dalam dua item di bawah ini :

1. Pemimpin/Tokoh Publik, para pemimpin, baik formal maupun informal, nasional maupun lokal, di samping bisa berfungsi sebagai *experts* dan *lay agents* juga harus bisa mencitrakan diri sebagai individu (*person*) yang dapat dipercaya. Budaya KKN – yang bersumber pada korupsi – harus dihilangkan. Mentalitas korupsi, tidak saja merugikan negara, tetapi juga berimbas pada krisis kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada para pemimpin (termasuk pejabat). Di samping itu, para pemimpin harus pandai memilih dan menepati janji. Kemampuan memilih dan menepati janji ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Di samping para pemimpin, tokoh-tokoh publik – yang biasanya hadir dan dibesarkan oleh media massa – harus pula mampu mencitrakan diri sebagai individu yang berkarakter kuat. Hal ini penting karena para tokoh publik ini biasanya mempunyai kharisma yang kuat dan penggemar (*fans*) yang militan. Seluruh tindak-tanduk tokoh-tokoh publik biasanya diikuti pula oleh para penggemarnya.
2. Keluarga dan Kekerabatan, hasil studi Putnam dan Fukuyama menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan kekerabatan mempunyai pengaruh kuat dalam menciptakan

suasana yang kondusif bagi kapital sosial. Lebih dari itu, Erikson (Juliawan, 2000) menjelaskan bahwa bahwa rasa aman yang dibangun sejak masa kanak-kanak, yaitu antara anak dengan ibu atau pengasuhnya. Anak belajar untuk percaya dan dipercaya ibu atau pengasuhnya. *Basic trust* yang awalnya dibangun lewat interaksi dengan figur ibu ini kemudian berlahan akan berkembang menjadi *trust* pada orang lain. Oleh karena itu, keluarga dan kekerabatan harus mampu mengkonduksikan *trust* ini. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan momok bagi hancurnya *trust*. Bukankah keluarga adalah organisasi sosial paling kecil?

Sinergi antara kepercayaan terhadap abstract systems dan personal ini akan menciptakan kapital sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasionalnya, yaitu : 1) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Akhirnya, penulis teringat filosofi sapu lidi. Jika ada satu bundel sapu lidi yang terikat kuat maka dia (sapu lidi itu) sulit dipatahkan dan bahkan mampu membersihkan pekarangan rumah yang kotor. Sebaliknya, jika hanya ada satu biji sapu lidi, alih-alih tak terpatahkan, sanggup membersihkan pekarangan yang kotor saja mustahil. Agaknya, dalam mengelola kapital sosial untuk membangun Indonesia, kita harus berpijak dari filosofi sapu lidi ini.

E. The Indonesian Dream

Di wilayah yang sekarang berdiri negara Indonesia – ribuan tahun yang lalu – pernah hadir dua peradaban agung dengan sejarah dan filosofi peradabannya yang mengagumkan. Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa – hadir dalam kurun waktu yang berbeda – menyumbangkan kemilau peradabannya pada dunia. Secara historis, Kerajaan Sriwijaya hadir lebih dahulu dari Kerajaan Majapahit. Tetapi, jika ditilik dari capaian peradabannya, Kerajaan Majapahit lebih menonjol dibanding Kerajaan Sriwijaya. Hal ini diindikasikan dari cakupan wilayah yang dikuasainya (Majapahit lebih luas), ketahanan peradabannya (Majapahit lebih lama menjaga kesinambungan generasi) dan capaian kemakmurannya (Majapahit lebih makmur).

Terdapat tiga visi yang membuat Kerajaan Majapahit mampu melebihi keagungan Kerajaan Sriwijaya. Ketiga visi tersebut terangkum dalam sebuah sesanti populer: “*Panjang Punjung Pasir Wukir, Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Karta Raharja*”. Sesanti ini populer karena selalu dikomunikasikan pada masyarakat umum melalui media kesenian *Wayang*. Secara detail makna dari sesanti ini terjabar dalam penjelasan sebagai berikut (Purwadi, 2005) :

1. *Panjang Punjung Pasir Wukir*, terdiri dari empat kata yang terurai sebagai berikut : 1) *Panjang*, dalam *suluk* pedalangan dijelaskan *panjang dawa pocapane* berarti mempunyai sejarah yang lama. Suatu bangsa yang akar historisnya jika ditelusuri dan dihayati akan menambah kepercayaan diri yang kuat. Dengan membandingkan peristiwa masa lalu dan peristiwa yang sedang berlangsung akan mudah mencari jalan keluar dari setiap persoalan memiliki nilai kesamaan. Kegagalan dan keberhasilan masa lalu akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Demikianlah Majapahit, kerajaan agung yang tumbuh membangun peradaban dengan tanpa melupakan sejarah masa lalu yang mengikutinya. Kemuliaan masa lalu merupakan spirit yang kuat untuk mencipta kemuliaan-kemuliaan yang baru. Tokoh pergerakan Indonesia Modern, Soekarno pernah berujar : “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (JAS MERAH). 2) *Punjung*, merujuk pada keluhuran wibawa yang dimiliki Majapahit. Kewibawaan negara Majapahit diperoleh dari pengakuan rakyat dalam negeri dan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Rakyat yang sejahtera lahir-bathin dan negara tetangga yang mendapatkan hutang budi merupakan modal pokok negara Majapahit untuk tampil terkemuka mendapat pengakuan dan kewibawaan. 3) *Pasir* – dalam dunia pewayangan – dimaknai sebagai samudera. Pemaknaan kata *pasir* ini tentu berdasarkan realita bahwa Majapahit memiliki wilayah yang sebagian besar adalah samudera raya. Harus diakui, samudera atau lautan merupakan sumber kekayaan alam yang melimpah ruah. Di sana terdapat sumber daya laut yang sangat besar dan merupakan jalur perdagangan, pelayaran dan pelabuhan Majapahit. Bahan tambang juga banyak tersimpan dalam laut. Produksi garam besar-besaran bisa dilakukan di sekitar laut. Demikian pula keanekaragaman hayati, tumbuh-tumbuhan laut, terumbu karang, dan ikan-ikan tentu bisa mendatangkan kemakmuran. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan negara Majapahit menguasai teknologi dan ilmu kelautan. Dalam sejarah keemasannya, Majapahit pernah mempunyai armada laut yang tangguh dan penuh wibawa. 4) *Wukir* berarti gunung, Kraton Majapahit – di samping berada di hamparan samudera yang luas – dikelilingi panorama gunung yang indah permai. Adanya pegunungan menambah kesuburan tanah. Hutan Majapahit memuat kekayaan hewani dan nabati. Kayu-kayuan yang sangat mahal bermutu tinggi melimpah-ruah di hutan-hutan Majapahit. Sebagai contoh, kayu jati di hutan Pulau Jawa dan kayu rotan di hutan belantara Kalimantan. Pengelolaan hutan yang terbuka, adil dan teratur membuka lebar-lebar kesempatan pemakmuran rakyat. Wukir juga dapat dimaknai pegunungan yang indah. Majapahit kaya akan deretan pegunungan

yang menawan hati, menyajikan panorama indah dan udara sejuk yang membuat betah dan nyaman bagi orang yang tinggal. Keindahan panorama Majapahit banyak memikat orang asing datang melancong. Hal ini tentu menambah kemakmuran rakyat.

2. *Gemah Ripah Loh Jinawi*, Negara Majapahit berhasil mewujudkan masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi*, yang bermakna : 1) *Gemah* dalam dunia pewayangan berkaitan dengan kesibukan orang berdagang. Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian yang sangat penting. Suatu negara yang lancar dan aman proses perdagangannya, pertanda bahwa ekonomi berjalan dengan baik dan dinamis. Pertukaran barang membuat kehidupan menjadi bergairah dan hal ini berkaitan dengan semangat kerja. Etos kerja dapat dirangsang dengan imbalan yang memadai. Dunia perdagangan yang *gemah* menjanjikan hal itu. Siang malam orang berjualan di pasar tidak lelah dan tidak mengantuk. Hujan dan panas tidak merongrong usahanya untuk maju berkembang. Untuk itu, negara harus menjamin keamanan perdagangan.
- 2) *Ripah* mengacu pada keramaian Negara Majapahit. Daya pikat Majapahit dalam banyak hal (alam, manusia, ilmu-pengetahuan (khususnya agama), sosial dan budaya) membuat banyak orang berkunjung dan berbondong-bondong untuk mencari penghidupan, belajar atau sekedar berdarma wisata. Di mana saja yang banyak dituju orang pasti di situ banyak manfaat yang didapatkan. Ibarat pepatah : ada gula ada semut.
- 3) *Loh* berarti kesuburan. Tanah yang subur dan dapat menumbuhkan segala tanaman dengan baik disebut tanah yang *loh*. Di wilayah Majapahit tanahnya sangat subur. Palawija, palagandul dan palakependem di mana-mana subur menghijau dan menentramkan mata memandang. Ketentraman ini berbuah pada kenyamanan semua orang untuk tidak saling bersaing. Kekerasan dan kecemburuan dapat dihindari. Tanah tumpah darah yang sudah *loh* ini perlu dikelola dengan baik.
- 4) *Jinawi* dalam dunia pewayangan berarti apa yang dibeli serba murah. Kebutuhan hidup sehari-hari dapat dijangkau oleh masyarakat Majapahit secara mudah. Kesenjangan daya beli antara si punya dan si tidak punya tidak terlampau lebar. Kecemburuan sosial yang berkaitan dengan kesenjangan daya beli membuat orang yang merasa tidak mampu akan berbuat nekad agar dirinya dapat mengejar ketertinggalan. Orang mau menjambret, mencopet, merampok, merompak, korupsi dan menjadi pelacur karena dengan jalan wajar dia tidak bisa (sulit) memperoleh rejeki. Negara yang memperoleh predikat Jinawi, rakyatnya akan ramah dan murah senyum. Tegur sapa sesama bukan barang mahal dan lebih penting lagi masyarakat akan mulai memikirkan cara

memaknai hidup, entah dengan berkesenian atau mengembangkan pemikiran ilmiah-religius. Kesenian, religiusitas dan ilmu-pengetahuan pun berkembang pesat.

3. *Tata-Tentrem Kerta Raharja*, Negara Majapahit juga berhasil mewujudkan masyarakat yang tata-tentrem kerta raharja. 1) *Tata-tentrem* berarti tentram, tenang, aman, damai dan dapat membahagiakan lahir maupun bathin. *Tata-tentrem* merujuk pada aspek kejiwaan. Untuk mencapai suasana tata-tentrem ini, antar unsur masyarakat harus saling menghormati hak dan kewajiban, terbuka, toleran, tenggang rasa, *tepa selira*, tahu diri, mawas diri, introspeksi, kompromis dan humanis. Di sini pengendalian diri terhadap pergaulan sangat diperlukan. Masyarakat yang tata-tentrem akan membuat hidup menjadi kerasan atau betah. Dalam suasana tata-tentrem tidak akan ada orang yang merasa dihina dan diremehkan, apalagi merasa terancam jiwa dan hartanya. 2) *Karta* berkaitan dengan kemakmuran dan aktivitas kerja rakyat Majapahit. Kesuburan tanah dan kekayaan laut berpadu dengan etos kerja yang tinggi akan menghasilkan kemakmuran. Hal ini mengindikasikan suasana masyarakat yang gemar berkarya, produktif dan sibuk sesuai bakat-potensi yang dimilikinya. Pedagang rajin berdagang, petani sibuk bercocok-tanam, peternak rajin menggembala, aparat negara sibuk mengelola hajat hidup orang banyak. Kesibukan kerja yang produktif akan mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang menjurus pada kriminalitas. Masing-masing individu mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi kejayaan negara. 3) *Raharja* berarti jauh dari kejahatan. Koruptor, pencuri, perampok, dan penyakit masyarakat lainnya tidak akan mendapat tempat. Harta dan kekayaan, ternak dan hasil pertanian aman ditaruh dimana saja, tidak ada kejahilan dan kejahatan yang mengganggu. Mereka yang kecukupan membantu yang tidak berkecukupan. Hal ini menjadikan yang kekurangan kerjanya menjadi giat untuk mengejar ketertinggalan dan bisa membagi hartanya kepada orang lain. Kejujuran dan kesaling-pengertian menjadi denyut nadi kehidupan.

Ketiga hal di atas itulah yang mampu menghantarkan Majapahit sebagai kerajaan yang makmur-bersahaja. Makmur karena kekayaan alamnya mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan devisa negara melimpah. Bersahaja karena kemakmuran yang dihasilkannya ditopang atas dasar untuk kepentingan bersama. Gotong-royong dan gugur-gunung menjadi bagian hidup sehari-hari. Kapital sosial Majapahit sangat kuat menopang dan menggerakkan kemakmuran yang dimilikinya. Dan, keragaman agama, ras dan suku bangsa tidak menimbulkan gejolak. Kita masih ingat dengan konsepsi agung pondasi kapital sosial

Majapahit : “*bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*”. Konsepsi inilah yang sekarang hendak kita wujud-terapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang telah menjadi visi dan berhasil wujud-nyatakan oleh Kerajaan Majapahit itulah yang seharusnya menjadi mimpi saya, mimpi anda, mimpi kita semua, mimpi Indonesia. *The Indonesian Dream*.

F. Kesimpulan

Dalam tulisan paper ini, penulis telah memberikan argumentasi bahwa untuk mengurai benang kusut pembangunan di Indonesia, tidak bisa jika hanya mengandalkan kapital ekonomi. Rezim Orde Baru cukup menjadi bukti bahwa orientasi yang sepihak pada kapital ekonomi akan berdampak pada kerapuhan bangsa secara kolektif. Untuk itu, bagi penulis, konsepsi kapital sosial layak dijadikan alternatif untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berjuang bersama-sama secara kolektif untuk merajut kembali *social-networks* di masyarakat yang sekarang ini tampak-tampaknya sudah mulai pudar.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Ricardi. S., 2006. “*Potret Suram Bangsaku, Gugatan dan Alternatif Desain Pembangunan*”, Uniiiverstas Indonesia Press.
- Burt, Ronald S. 2000. *The Network Structure of Social Capital*, in Research in Organizational Behaviour, Volume 22, Greenwich, C.T, JAI Press.
- Bourdieu, Pierre. 1986. “*The Forms of Capital*”, in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G. Richardson. Westport, CT.: Greenwood Press.
- De Fillipis, James. 2010. *The Myth of Social Capital in Community Development*, in Housing Policy Debate, Volume 12 issue 4, Fannie Mae Foundation.
- Dwyer, Claire et. all. 2006. “*Ethnicity as Social Capital? Explaining the Differential Educational Achievements of Young British Pakistani Men and Women*”, Paper presented at the ‘Ethnicity, Mobility and Society’ Leverhulme Programme Conference at University of Bristol, 16-17 March.
- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*, prepared delivery at the IMF Conference on Second Generation Reforms.
- , 2002. *The Great Disruption, Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, Profile Books, London,
- Hayami, Y, *Development Economic: From the Poverty to the Wealth of Nations*, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Juliawan, B. Harry. 2000. *Dunia yang Berlari*, dalam Majalah BASIS Nomor 01 – 02, tahun ke 49, Januari – Februari.

- Lin, Nan. 1999. *Building a Network Theory of Social Capital*, paper was presented as the Keynote Address at the XIX International Sunbelt Social Network Conference, Charleston, South Carolina, February 18-21.
- Mas' oed, Mochtar. 2003. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Murata, Sachiko. 1997. *The Tao of Islam : Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi Islam*, Mizan, Bandung.
- Nababan, Abdon, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, makalah disajikan dalam Seminar Setengah Hari, kerja sama CSIS dan Yayasan SEJATI dalam rangka Merayakan Setengah Abad Kemerdekaan, dengan tema: "Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan", Jakarta 7 Agustus 1995.
- Purwadi. 2005. *Babad Majapahit*, Media Abadi, Yogyakarta.
- Putnam, Robert. D. 1995. "Bowling alone: America's declining social capital", *Journal of Democracy* 6:1, January.
- . 1999. *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey.
- . 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. NY: (ed) Simon and Schuster.
- Quillian, Lincoln, *Can Social Capital Explain Persistent Racial Poverty Gaps?*, Paper prepared for The Colors of Poverty, June, 12, 2006.
- Rudy, *Hilangnya Ruang Publik: Ancaman bagi Kapital Sosial di Indonesia*, dalam *Jurnal INOVASI* Vol.7/XVIII/Juni 2006.
- Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), *Kerusuhan-Kerusuhan Sosial di Indonesia*, dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia* No 5/2001.